

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aktivitas bisnis merupakan fenomena yang sangat kompleks karena mencakup berbagai bidang diantaranya hukum, ekonomi, dan politik. Dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat bahwa aktivitas manusia dalam dunia bisnis tidak lepas dari peranan bank selaku pemberi layanan perbankan bagi masyarakat. Menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan, pengertian bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan pengertian diatas, kegiatan pokok bank adalah menerima simpanan dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dalam bentuk giro, tabungan serta deposito berjangka dan memberikan kredit kepada pihak yang memerlukan dana. Kegiatan bank pada akhirnya akan diarahkan kepada peningkatan taraf hidup masyarakat, agar masyarakat menjadi lebih baik dan lebih sejahtera daripada sebelumnya. Dalam menjalankan kegiatannya tersebut, bank wajib memiliki asas demokrasi ekonomi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Perkembangan perekonomian yang terjadi di Indonesia maupun di dunia, membuat dunia usaha atau perusahaan menjadi semakin kompleks, bervariasi serta sangat dinamis. Perkembangan tersebut telah membawa perusahaan kepada budaya kerja yang baru yang lebih menekankan pada inovasi perusahaan tersebut. Baik disadari maupun tidak, perkembangan usaha yang terjadi di masyarakat telah menyebabkan semakin ketatnya persaingan yang terjadi di dalam dunia bisnis. Hal tersebut membuat setiap perusahaan yang ada terus berusaha untuk menggali potensi yang dimilikinya.

Kondisi persaingan usaha yang semakin ketat inilah, menjadikan perusahaan berusaha agar dapat mencapai tujuan intern perusahaan tersebut, terutama dalam usaha untuk menciptakan laba atau keuntungan. Namun untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah karena perusahaan harus memiliki prosedur untuk bersaing dengan efektif serta menerapkan sistem pengendalian intern seefisien mungkin agar dapat menghasilkan laba secara maksimal.

Semakin besarnya aktivitas atau operasi perusahaan maka tidaklah memungkinkan apabila seorang manajer harus mengawasi jalannya perusahaan secara langsung. Hal tersebut disebabkan oleh adanya keterbatasan waktu, tenaga, pemikiran serta pengetahuan yang dimiliki oleh seorang manajer. Sementara dalam aktivitas di sebuah perusahaan sangat dituntut adanya kecakapan serta ketepatan dalam pengambilan keputusan saat menghadapi setiap permasalahan yang ada.

Mengatasi masalah tersebut, maka perlu ada pendelegasian wewenang atau tugas operasional dari manajer utama kepada manajer bagian. Hal ini bertujuan agar pengambilan keputusan terhadap masalah-masalah yang terjadi di lapangan dapat dilakukan dengan cepat oleh para manajer bagian sehingga kontinuitas perusahaan dapat terjaga. Namun kegiatan pada manajer ini harus diawasi oleh manajer utama agar tidak terjadi penyimpangan terhadap rencana awal perusahaan. Untuk dapat melakukan hal tersebut, maka diperlukan kegiatan pengendalian yang dapat menjamin bahwa operasi perusahaan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan perusahaan. Agar pengendalian intern dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan peraturan dan pedoman yang jelas untuk mencapainya. Pedoman-pedoman dalam menjalankan pengendalian intern tersebut dijabarkan dalam pengendalian intern.

Berdasarkan pengertian dari *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO) dalam Santoyo (2007: 69) memberikan definisi dari pengendalian intern adalah "*Internal control is a process, affected by an entity's board of director, management and other personal, designed to provide reasonable assurance regarding to the achievement of objectives in the following categories: (1) the effectiveness and efficiency of operations, (2) the reliability of financial reporting and (3) the complicate with applicable law and regulations*".

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pengendalian intern adalah suatu proses dan aktivitas operasional organisasi dan merupakan

bagian integral dari proses manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Pengendalian intern merupakan bagian integral dari proses manajemen. Karena konsep dari pengendalian intern meliputi: (1) berbagai kegiatan, (2) dipengaruhi oleh manusia, (3) diharapkan dapat mencapai tujuan (Alvin, 2001: 292)

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pihak manajemen memiliki peran untuk menyusun, melaksanakan dan selalu mengawasi secara terus-menerus proses berlangsungnya pengendalian intern dalam perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian intern mencakup alat, metode serta cara yang memiliki peranan sangat penting dalam mengamankan harta kekayaan perusahaan. Pengendalian intern yang baik harus mampu mencegah perusahaan dari segala bentuk kehilangan harta atau aset yang dimiliki perusahaan. Kehilangan harta harus dicegah karena kehilangan tersebut akan mengakibatkan terlambatnya pencapaian tujuan perusahaan.

Pada perusahaan pembiayaan atau bank, harta yang paling utama adalah aktivitas nasabah dalam menyimpan uang sebagai kekayaan ataupun pemberian kredit kepada konsumen atau nasabah karena jantung kehidupan bank atau sumber pendapatan utama bank ini ada pada pemberian kredit kepada nasabah yang memerlukan uang. *Credit is the personal reputation a person has, in consequence of which he can buy money or goods or labor, by giving in exchange for them, a promise to pay at a future time*"(Mac Leod dalam Rahmat Firdaus, 2004:1)

Berdasarkan pengertian tersebut, maka kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang, yang memungkinkan untuk dapat memperoleh uang, barang-barang atau buruh/tenaga kerja, dengan jalan menukarkannya dengan suatu janji untuk membayarnya pada waktu yang akan datang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila kredit pembiayaan konsumen dapat dikelola atau ditagih dengan baik dan lancar, maka aktivitas perusahaan tidak akan terganggu. Kelancaran aktivitas ini harus terus dijaga mengingat bahwa kredit sangat berkaitan dengan likuiditas perusahaan serta secara langsung akan berpengaruh terhadap modal kerja yang dimiliki bank.

Bank sebagai perusahaan pemberi kredit (*money lender*) mempunyai berbagai sumber pendapatan. Kredit merupakan sumber pendapatan yang terbesar bagi bank dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya. Namun dalam penyaluran kredit kepada debitur tidak jarang bank menghadapi masalah baik dari pihak bank itu sendiri maupun dari pihak nasabah. Kemudahan pemberian kredit dipandang sebagai bentuk kegiatan usaha yang positif dalam meningkatkan penjualan perusahaan dan memperluas pangsa pasar. Namun bila hal ini tidak dikelola dengan baik juga dapat menjadi masalah bagi perusahaan dalam bentuk kredit bermasalah yang dapat mengganggu aktivitas perusahaan. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan manajemen yang dapat memperkecil resiko kerugian akibat dari tidak lancarnya pengembalian kredit yang telah diberikan.

Kebijakan PT. Bank Sulut Cabang Limboto yang umum digunakan untuk menghindari resiko adalah dengan menerapkan prosedur pemberian kredit dan pengawasan kredit yang melekat pada sistem akuntansi yang ada pada perusahaan. Prosedur pemberian kredit berguna untuk memastikan bahwa pemberian kredit telah melewati suatu proses pengkajian dan penelitian yang seksama sehingga manajemen berkesimpulan bahwa kredit layak diberikan. Namun, PT. Bank Sulut Cabang Limboto masih memiliki kendala dalam menjalankan aktivitas, antara lain; pihak bank dalam menganalisis calon debitur kurang ketat, sehingga berdampak pada kredit macet, kurangnya penerapan sistem pengendalian intern yang baik dan kurangnya kontrol pihak bank dalam mengawasi nasabah yang melakukan pinjaman. Oleh karena itu, untuk menghindari kredit macet tersebut diperlukan suatu pengendalian intern di dalam mengelola kredit kepada konsumen. Pengendalian intern dapat membantu manajemen dalam mengamankan harta bendanya, menguji ketelitian dan keandalan data bank, meningkatkan efisiensi dan ketaatan pada kebijakan yang telah digariskan oleh pimpinan bank, serta diperlukan sebuah sistem yang disebut dengan pengendalian intern. Pengendalian intern merupakan alat, metode dan cara yang bertujuan untuk menjaga keamanan harta bank.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan yang timbul pada PT. Bank Sulut dalam menerapkan sistem pengendalian intern, yang diformulasikan dalam sebuah judul

“Pengaruh Pengendalian Intern Prosedur Pemberian Kredit terhadap Tingkat Pengembalian Piutang pada PT. Bank Sulut Cabang Limboto”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pihak bank dalam menganalisis calon debitur kurang ketat, sehingga berdampak pada kredit macet.
2. Kurangnya penerapan sistem pengendalian intern yang baik dan kurangnya kontrol pihak bank dalam mengawasi nasabah yang melakukan pinjaman.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pengendalian intern prosedur pemberian kredit berpengaruh terhadap tingkat pengembalian piutang pada PT. Bank Sulut Cabang Limboto ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan utama dalam penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh pengendalian intern prosedur pemberian kredit terhadap tingkat pengembalian piutang pada PT. Bank Sulut Cabang Limboto.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah ilmu di bidang akuntansi khususnya di bidang intern prosedur pemberian kredit dan tingkat pengembalian piutang, serta dapat membandingkan antara teori yang didapatkan dibangku kuliah dengan kenyataan yang dihadapi oleh PT. Bank Sulut Cabang Limboto.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai dan manfaat kepada berbagai pihak yang membutuhkan terutama bagi pihak bank seperti pertimbangan dalam menerapkan sistem pengendalian piutang dan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan piutang. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi atau pedoman untuk penelitian selanjutnya.